BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

Sejak tahun 1998 Kota Bandung menetapkan tanggal 25 September sebagai "Hari Jadi Kota Bandung", sebelumnya terdapat beberapa pandangan tentang hari jadi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengidentikkan hari jadi dengan tanggal pembentukan *Gemeenete* Bandung (1 April 1906). Beberapa waktu lamanya tanggal 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Sementara itu di kalangan masyarakat ada tanggapan bahwa hari jadi Kota Bandung adalah 25 Mei 1801. Dengan kata lain, sebelum tahun 1998 pemahaman mengenai hari jadi Kota Bandung sangat simpang siur, kesimpang siuran itu terjadi akibat proses sejarah berdirinya Kota Bandung tidak atau belum dipahami secara jelas. Hal itu dapat dipahami karena Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang usianya sudah tua.

Menyadari akan pentingnya pelurusan sejarah agar tidak mewariskan sejarah yang keliru (salah) kepada generasi penerus, sejak tahun 1997 Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian fakta dan sejarah. Usaha itu dilakukan melalui seminar (10 Maret 1997), seserahan (22 Januari 1998), ditindaklanjuti oleh beberapa diskusi. Diskusi difokuskan pada pembahasan tiga buah sumber tertulis yaitu, surat Daendels bertanggal 23 Mei 1810,

naskah sadjadah Bandung dan melibatkan sejumlah pakar diberbagi bidang seperti sejarawan, pakar pemerintahan, budayawan, dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Selanjutnya dibentuk tim kerja untuk menelusuri hari jadi Kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian itu menghasilkan tanggal 25 September 1810 sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”.

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daearh Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika-Jalan A.Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke

Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810

Berikut adalah daftar nama yang pernah menjabat sebagai Walikota Bandung, sebagai berikut :

Tabel 1.1

WALIKOTA BANDUNG Tahun 1906 – Sekarang

No.	Nama	Masa Jabatan
1	E.A Maurenbrecher (exofficio)	1906-1907
2	R.E Krijboom (exofficio)	1907-1908
3	J.A van Der Ent (exxoficio)	1909-1910
4	J.J Verwijk (exofficio)	1910-1912
5	C.C.B van Vlenier dan B. van Bijveld (exofficio)	1912-1913
6	B. Coops	1913-1920
7	S.A Reitsma	1920-1921

8	B. Coops	1921-1928
9	Ir. J.E.A van Volsogen Kuhr	1928-1934
10	Mr. J.M Wesselink	1934-1936
11	N. Beets	1936-1942
12	R.A Atmadinata	1942-1945
13	R. Siamsurizal	1945-1946
14	Ir. Ukar Bratakusumah	1946-1949
15	R. Enouch	1949-1956
16	R. Priatna Kusumah	1956-1966
17	R. Didi Jukardi	1966-1968
18	Hidayat Sukarmadijaya	1968-1971
19	R. Otje Djundjunan	1971-1976
20	H. Ucu Junaedi	1976-1978
21	R. Husein Wangsaatmaja	1978-1983
22	H. Ateng Wahyudi	1983-1993
23	Wahyu Hamidjaja	1993-1998
24	Aa Tarmana	1998-2003
25	H. Dada Rosada	2003-sekarang

Sumber: DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2011

Tabel 1.2

Peristiwa Berawalnya Bandung Menjadi Sebuah Kota

Masa	Peristiwa
1488	Bandung didirikan sebagai bagian dari Kerajaan Pajajaran
1799	Menjadi bagian dari Sumedang Larang diserahkan kepada Pemerintah Belanda dari kompeni
1811	Dinyatakan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung
1906	Gemeente Bandoeng
1917	Burgemeester Van Bandung yang pertama
1926	Staadsgemeente Bandoeng
1942	Bandung Si
1945	Pemerintah Nasional kota Bandung
1949	Haminte Bandung
1850	Kota besar Bandung
1957	Kota Kotapraja Bandung
1966	PemerintahDaerah Kotamadya Bandung
1974	Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Sumber: DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2011

1.1.1. Lambang Kota Bandung

Lambang kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 april 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi

Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6 Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK- LINTANG mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH(PERAK) pada pinggir sebelah atasnya:

Gambar 1.1

Lambang Kota Bandung



Sumber: DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2011

Filosofi Lambang Kota Bandung :

1. bagian atas latar KUNING (EMAS) dengan lukisan sebuah GUNUNG berwaarna HIJAU yang bertumpu pada blok-lintang daaan
2. bagian bawah latar PUTIH(PERAK) dengan lukisan empat bidaang jalur mendatar berombak yang berwarna BIRU.

Di bawah perisai itu terlukis sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, Pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf

besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI.

Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuandengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

- KUNING (EMAS), berarti : kesejahteraan, kaluhungan.
- HITAM (SABEL), berarti : kokoh, tegak, kuat.
- HIJAU (SINOPEL), berarti : kemakmuran sejuk
- PUTIH (PERAK), berarti : kesucian
- BIRU (AZUUR), berarti : kesetiaan

Gemah ripah wibawa mukti, berarti : tanah subur rakyat makmur

1.1.2 Bendera Kota Bandung

Bendera yang digunakan oleh Kotamadya Bandung adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 8 Juni 1953 No. 9938/53.

Bentuk bendera tersebut adalah seperti yang tercantum pada 8ictum Keputusan tersebut diatas sebagai berikut :

Gambar 1.2

Bendera Kota Bandung



Sumber: DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2011

Filosofi Bendera Kota Bandung

- Bendera yang dipergunakan oleh Kota Besar Bandung dan tiga bidang jalur mendatar, masing- masing berturut-turut dari atas kebawah berwarna HIJAU, KUNING dan BIRU
- Perbandingan-perbandingan antara lebarnya dan jalur-jalur tersebut dibawah huruf a urutan dari atas kebawah adalah 2:1:1
- Perbandingan antara panjang dan lebarnya berbeda itu 7:5.

1.1.3 Visi & Misi Kota Bandung

1.1.3.1 Visi Kota Bandung

Adapun visi kota Bandung sebagai berikut : "Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)"

Untuk Merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen

seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

- **Pertama** : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa.
- **Kedua** : Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.
- **Ketiga** : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota.
- **Keempat** : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau haraga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya.Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya

kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

1.1.3.2 Misi Kota Bandung

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

- Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
- Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup

peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

- Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.
- Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
- Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

1.2 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAKOMINFO Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengan demikian Bakominfo berdiri sejak diberlakukannya PERDA Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dengan diterbirkan dan berlakunya Perda Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Tanggal 7 Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

1.2.1 Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

1.2.2 Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Diskominfo mempunyai fungsi, diantaranya :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat.
- Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat.

- Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas, dan
- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Visi Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mendukung Visi Kota bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Visi sebagai berikut :

"Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)".

1.2.4 Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi merupakan tujuan tugas yang diemban Diskominfo, meliputi :

- Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan penyendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika.
- Meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasisi tekhnologi informasi.
- Meningkatkan kerjasama, kemitraan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.

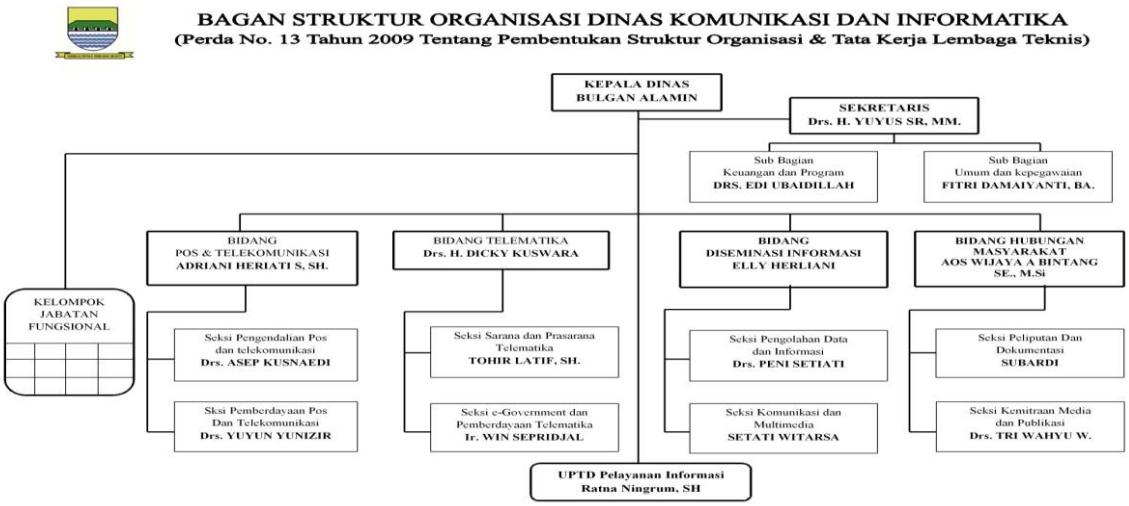
- Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan onformatika yang handal.

1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuknya bagan struktur organisasi yang masing-masing memiliki jabatan atau kedudukan yang telah di tentukan, dan berdasarkan keputusan Perda No.13 Tahun 2009.

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



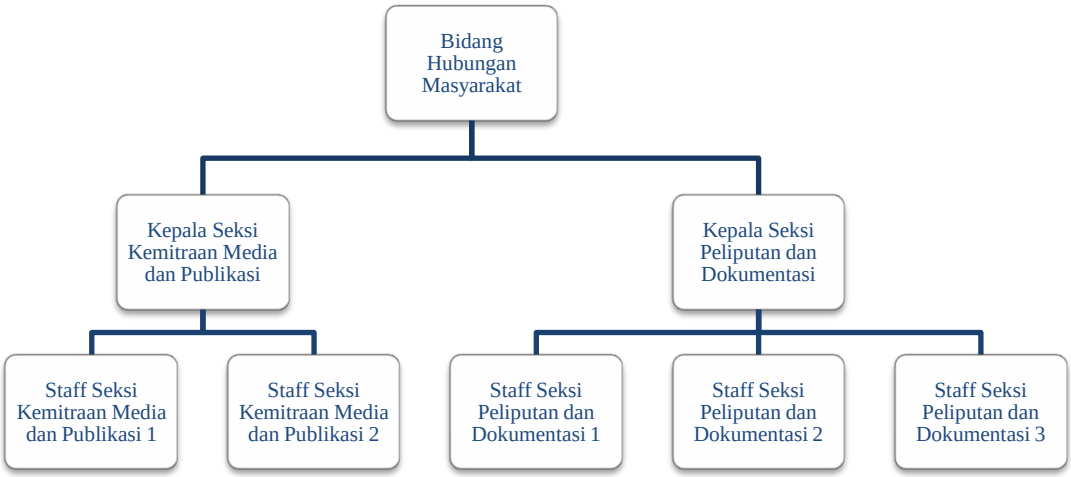
Sumber: DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2011

1.4 Struktur Divisi Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika

Didalam struktur divisi Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika terbagi Kepala yang masing-masing mempunyai bawahan dalam bidangnya dengan tugas dan wewenang yang telah di berikan.

Gambar 1.4

Struktur Organisasi Divisi Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber: DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2011

1.5 Job Description

Bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok, sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika lingkup Hubungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada di atas, bidang Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan dan publikasi.

- Penyusun petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan media dan dokumentasi.
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan dan publikasi.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup liputan dan dokumentasi serta kemitraan dan publikasi.

1.5.1 Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi

Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Hubungan Masyarakat lingkup peliputan dan dokumentasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Seksi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peliputan dan dokumentasi.
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi.
- Pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi yang meliputi kegiatan *eksekutif, legislatif, konferensi pers, pers release.*
- Pelaksanaan *pengawasan* dan pengendalian penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi.

Seksi Peliputan dan Dokumentasi membawahi :

Staff Seksi Peliputan dan Dokumentasi 1,2 dan 3

Staff Seksi Peliputan dan Dokumentasi 1,2, dan 3 mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang di maksud di atas, Staff Seksi Peliputan dan Dokumetasi 1,2, dan 3 mempunyai fungsi :

- Mengumpulkan hasil peliputan dan dokumentasi yang meliputi kegiatan *eksekutif, legislatif, konferensi pers, pers release.*
- Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hasil peliputan dan dokumentasi.

1.5.2 Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi

Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasiional dan fasilitasi publikasi dan kemitraan media.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan di atas, Seksi Kemitraan Media dan Publikasi mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan pengolahan data kegiatan publikasi dan kemitraan media.
- Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi publikasi dan kemitraan media.

Seksi kemitraan Media dan Publikasi, membawahi :

Staff Seksi Kemitraan Media dan Publikasi 1 dan 2

Staff Seksi Kemitraan Media dan Publikasi 1 dan 2 mempunyai tugas pokok membantu menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi publikasi dan kemitraan media.

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan di atas, Seksi Kemitraan Media dan Publikasi 1 dan 2 mempunyai fungsi :

- Membantu penyusunan dan pengolahan data kegiatan publikasi dan kemitraan media.
- Membantu penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi publikasi dan kemitraan media.

1.6 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat dalam Diskominfo diantaranya:

Tabel 1.3

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung	1	Baik
2	Toilet	2	Baik
3	Ruang Kerja	5	Baik
4	Kantin	1	Baik
5	Mushola	1	Baik
6	Dapur	1	Baik

Sumber: DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2011

Tabel 1.4

Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
7	Meja	3	Baik
8	Komputer	2	Baik
9	Kursi Lipat	5	Baik
10	Lemari Rak (Bufet)	1	Baik
11	Telephone	1	Baik
12	Dispenser	1	Baik

Sumber: DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2011

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi PKL

Praktek Kerja Lapangan dilakukan di Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastukencana No.2 Bandung Jawa Barat Indonesia, (022) 4230393 www.bandung.go.id

1.7.2 Waktu PKL

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tersebut dilakukan terhitung mulai tanggal. 18 Juli 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011, dan pelaksannanya yaitu setiap hari senin s/d Jumat mulai Pukul 08.00 – 15.00 WIB